

UJIAN AKHIR

**PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI
KELOMPOK USAHA BERSAMA
(Di Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng
Kabupaten Bantaeng)**



Oleh

ABDULLAH

Nomor Pokok : P160 120 508

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
KONSENTRASI PEKERJAAN SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

UJIAN AKHIR

**PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI
KELOMPOK USAHA BERSAMA
(Di Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng
Kabupaten Bantaeng)**

Disusun dan diajukan oleh

ABDULLAH

Nomor Pokok : P160 120 508

Program Studi

MAGISTER SOSIOLOGI

Kelas Khusus

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI
KELOMPOK USAHA BERSAMA
(Di Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng
Kabupaten Bantaeng)**

ABDULLAH
P.160 120 508

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Prof. Drs. AR. HAFIDZ, MS

DR. BACHRAH DAFRID, MS

Ketua Program Jurusan Sosiologi

Prof. T.R. ANDI LOLO, Ph.D

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Konsep Pemberdayaan Keluarga Miskin	8
B. Pengembangan Sosial Ekonomi Keluarga	19
C. Kelompok Usaha Bersama	22
D. Pendamping Sosial Kube	29
E. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel	36

D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Pengolahan Data	37
H. Definisi Operasional	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Manfaat Program Pemberdayaan melalui Kube Bagi pemenuhan Kebutuhan Keluarga Miskin	44
C. Proses dan Bentuk Pemberdayaan Keluarga Miskin	46
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Pemberdayaan Keluarga Miskin	66
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak, demikian juga tidak tersedianya sumber mata pencaharian yang dapat memungkinkan untuk memberikan penghasilan yang layak serta kurangnya inisiatif untuk berusaha dalam memperbaiki tingkat kehidupannya sehingga kemiskinan keluarga dapat melahirkan keluarga yang gizi buruk, rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya kepemilikan, rendahnya pendapatan keluarga dan anak terancam putus sekolah, kemiskinan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menjadikan masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi pada bantuan pemerintah.

Masalah kemiskinan di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng adalah merupakan masalah sosial yang secara kualitas paling tinggi dibandingkan dengan masalah sosial lainnya yang mencapai ±547 KK.

Banyak karakteristik yang menjadi tanda adanya kemiskinan secara umum karakteristik tersebut ditandai dengan :

1. tidak memiliki faktor produksi sendiri.
2. tidak mempunyai kemungkinan memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
3. tingkat pendidikan pada umumnya rendah.
4. banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas.
5. diantara mereka berusia muda tidak mempunyai keterampilan dan pendidikan yang memadai (Emil Salim.2000 dalam Supriatna 1997:82)

Pada dasarnya keluarga miskin memiliki potensi tetapi tidak memiliki modal dan peralatan kerja yang memadai, harus mendapat perhatian yang serius tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari pihak yang peduli terhadap keluarga miskin. Keluarga miskin dimaksud adalah buruh tani, nelayan, pekerja kasar yang memiliki semangat dan motivasi kerja. Sebagian keluarga miskin telah mendapat bantuan dalam bentuk usaha ekonomis produktif melalui kube seperti bidang pertanian,. Peternakan, rumput laut, pertukangan dan sejenisnya (Hary, Hikmah, 2001:45).

Mubyarto (1988) mengemukakan bahwa keluarga miskin yang terdiri dari petani dan nelayan baik menetap di pedesaan maupun perkotaan sangat tertinggal kesejahteraan ekonomisnya, karena kelompok ini tidak memiliki harta kekayaan sehingga harus selalu menggantungkan hidupnya dari uluran

tangan orang lain. Bagi keluarga miskin yang potensial ini harus memanfaatkan bantuan secara produktif sehingga hasilnya dapat memenuhi kebutuhan sosial ekonomi keluarga.

Fokus perhatian pemerintah terhadap keluarga miskin karena dampak dari kemiskinan ini mempunyai implikasi terhadap masalah sosial lainnya yang dihadapi keluarga seperti tindakan kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum yang dihadapi keluarga seperti tindakan kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum yang dilakukan keluarga karena mempertahankan hidup. Hal ini sesungguhnya perlu ditangani secara tepat dan cepat dengan mengembangkan program yang langsung menyentuh kebutuhan keluarga.

Kegagalan berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah disebabkan oleh berbagai faktor, sebagaimana dikemukakan Suharto dkk (2003) sebagai berikut :

1. Program yang dikembangkan kurang sesuai baik dari segi kualitas maupun kuantitas
2. Pendekatan yang dilakukan belum profesional
3. Sosialisasi tentang program masih terbatas sehingga masih terbatas sehingga sulit untuk mengembangkan usaha yang diminati.
4. Pemberian keterampilan praktis kurang memadai baik dari segi waktu, instruktur maupun metodenya.

5. Tidak ada surat perjanjian akan hak, kewajiban dan sanksi bagi penerima program pelayanan. Hal ini menjadi titik kritis ketidakberhasilan program ekonomi produktif.
6. Kurangnya bimbingan dan petunjuk setelah menerima bantuan sosial.
7. Kurangnya koordinasi antar pelaksanaan program
8. Sarana dan prasarana belum sepenuhnya menunjang

Berbagai faktor tersebut di atas menunjukkan bahwa penanganan masalah kemiskinan masih perlu disempurnakan baik dari segi kebijakan maupun sasaran operasional sehingga dapat mengurangi hambatan yang dihadapi dalam memberdayakan keluarga miskin. Upaya ini juga perlu mendapat dukungan masyarakat yang peduli terhadap kalangan keluarga penyandang masalah kemiskinan agar program yang diimplementasikan dapat berjalan lancar untuk mencapai sasaran yakni peningkatan kualitas keluarga miskin.

Kesadaran akan pentingnya penanganan kemiskinan keluarga yang dilakukan pemerintah secara berkelanjutan dengan program yang menyentuh kebutuhan dari berbagai aspek kehidupan dengan menekankan pada penguatan kemampuan secara mandiri. Adapun program yang telah dikembangkan adalah kelompok usaha bersama, aring pengaman sosial untuk pendidikan dan kesehatan, bantuan usaha ekonomis produktif melalui kube, serta program keluarga harapan yang diharapkan dapat membantu

kehidupan keluarga miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan (Jamasya, 2004:109).

Berkaitan dengan upaya pemberdayaan keluarga miskin di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng diketahui bahwa terdapat 547 KK adalah keluarga miskin dengan mata pencaharian tidak tetap yakni buruh tani, tukang batu, tukang kayu, penarik gerobak yang penghasilan yang diperoleh masih sangat rendah sehingga masih sulit untuk menyekolahkan anak maupun ke puskesmas. Hal ini juga telah menimbulkan dampak negatif bagi keluarga miskin seperti melakukan pembuatan yang melanggar hukum dan perbuatan lainnya yang merugikan masyarakat dan lingkungan.

Bertolak dari permasalahan sosial yang dihadapi keluarga miskin maka kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng yang tertuang dalam rencana strategik tahun 2004-2009 memberi prioritas pengembangan sektor usaha industri rumah tangga dan juga sejalan dengan pelaksanaan kube yang merupakan program Departemen Sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng khususnya keluarga miskin di Kelurahan Karatuang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan keluarga miskin melalui KUBE di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan keluarga miskin melalui KUBE pada Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng.?
3. Sejauh mana program pemberdayaan melalui KUBE mempengaruhi peningkatan pendapatan keluarga miskin dalam KUBE?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan program pemberdayaan keluarga miskin melalui KUBE di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng..
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi program pemberdayaan keluarga miskin melalui KUBE di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng...
3. Untuk mengetahui peningkatan pendapatan ekonomi keluarga setelah ada KUBE.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang kesejahteraan sosial dalam menambah konsep dan wawasan tentang pemberdayaan keluarga miskin melalui kube.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan program pemberdayaan keluarga miskin melalui kube.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemberdayaan Keluarga Miskin

1. Konsep Pemberdayaan

Dalam pengertian umum pemberdayaan (empowerment) adalah suatu proses sosial multidimensi yang bertujuan untuk membantu individu, keluarga maupun kelompok agar dapat memperoleh kendali bagi kehidupan mereka sendiri.

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif. Secara sederhana pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan kontrol atas sumber-sumber yang ada.

Menurut Staples (dalam Parson, 1994) "*Empowerment as the process at gaining power, developing pwer, taking or seizing power or facilitating or enabling power*". Definisi tersebut dapat diartikan secara bebas bahwa pemberdayaan merupakan proses memperoleh kekuatan mengembangkan kekuatan atau memungkinkan memanfaatkan kekuatan oleh seseorang.

Hary Hikmah (2001) mengemukakan konsep pemberdayaan mempunyai 2 (dua) kecenderungan yakni pertama proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian

kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan mandiri melalui organisasi. Kecenderungan kedua menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Aillen (1998) berpendapat bahwa pemberdayaan adalah merupakan cara yang amat praktis dan produktif atau mendapatkan yang terbaik dari diri sendiri, sesungguhnya pemberdayaan adalah masalah keuntungan, waktu, mutu, komitmen, gagasan dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses sebagai tujuan, pemberdayaan merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai yaitu klien atau keluarga yang memiliki kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah kepada kemandirian. Sedangkan sebagai proses pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk mengubah orang dalam melihat dirinya sendiri bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya.

Menurut Prijono (1998) memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar memperoleh lapisan bawah terhadap kekuatan

penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan selain itu memberdayakan masyarakat juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berhak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Czuba (2000) mengemukakan bahwa ada tiga komponen penting dalam upaya memahami pemberdayaan yaitu :

1. Pemberdayaan bersifat multidimensi dimana terlibat didalamnya dimensi sosiologi, psikologi, ekonomi dan lainnya.
2. Pemberdayaan adalah suatu proses sosial manakala hal ini terjadi ada hubungannya dengan pihak lainnya.
3. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang mirip dengan suatu perjalanan bagi pihak yang sedang membangun dimana kita berkarya didalamnya.

Tikson dalam Sani (2000) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dijadikan tolok ukur dalam proses pemberdayaan yaitu :

1. Pengorganisasian masyarakat

Bidang ini berkenaan dengan peningkatan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan secara efektif melalui pengorganisasian masyarakat ke dalam beberapa bentuk seperti organisasi kewilayahan yang luas, organisasi sektoral dan jaringannya dan koalisi.

2. Penguatan kelembagaan

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan penguatan kemampuan organisasi yang telah ada dengan meningkatkan unsur : pengetahuan, keterampilan dan sumber daya yang termasuk di dalamnya proses perguliran, manajemen kemandirian kelompok norma dan nilai yang dianut organisasi agar kegiatan kolektif menjadi lebih efektif dalam penerapannya penguatan kelembagaan banyak dilakukan melalui pelatihan, keterampilan dan studi banding.

3. Manajemen sumber daya manusia

Kegiatan ini untuk menjamin bahwa kesejahteraan keluarga dapat ditingkatkan apabila mereka mampu mengelola sumber daya dengan baik termasuk di dalam kegiatan pengembangan organisasi sosial yang dapat melakukan fungsi pelayanan sosial seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi dan kegiatan lainnya.

Seluruh konsep yang dikemukakan para ahli pada prinsipnya pemberdayaan adalah upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam pencapaian tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Mengacu pada konsep Friedmann (1992) tentang konsep pemberdayaan sebagai upaya (berupa proses, strategi, program atau metode) yang ditujukan untuk membantu keluarga miskin menuju pada kemandirian melalui pendistribusian kembali kekuatan yang dibutuhkan, yang

dapat diwujudkan melalui gotong royong, kerjasama, kegiatan kelompok kemitraan dan aktivitas sejenisnya yang disepakati dan didukung bersama yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu-individu atau anggota keluarga.

Pemahaman tentang pemberdayaan seperti yang dikemukakan oleh Friedmann tersebut terlihat bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses tepat jika diaplikasikan untuk mengembangkan komunitas-komunitas tertentu yang mengalami ketertinggalan.

Pendapat pemberdayaan penting bagi strategi keadilan karena kemiskinan cenderung disebabkan oleh isu adanya ketidakadilan. Pemberdayaan sebagaimana dikemukakan Ife (1995) memiliki dua konsep pemberdayaan yaitu kekuasaan dan kurang beruntungan. Pertama pemberdayaan dilihat dari pemberian kekuasaan pada individu atau kelompok mengizinkan mereka menentukan kekuatan didalam tangan mereka sendiri. Kedua pemberdayaan dilihat dari ketidakberuntungan ini lebih dilatar belakangi pada struktur sosial yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki ruang yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan wilayahnya. Untuk itu pemberdayaan adalah salah satu tujuan dari pengembangan masyarakat atau keluarga dengan cara memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menentukan masa depan sendiri dan untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi komunitasnya.

2. Keluarga miskin

Keluarga merupakan lingkungan primer dalam proses pembentukan kepribadian anak yaitu media penanaman nilai-nilai moral keagamaan, kemanusiaan dan cinta kasih sayang baik terhadap orang tua maupun terhadap sesama. Keluarga mempunyai posisi yang strategis yakni pertama, keluarga dapat menjadi penyebab terjadinya masalah kesejahteraan sosial. Kedua, keluarga dapat menjadi korban permasalahan dari berbagai situasi dan kondisi struktur sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketiga, keluarga juga dapat menjadi sumber pemecahan masalah.

Departemen Sosial (1998) mendefinisikan keluarga yakni unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

Disadari bahwa struktur keluarga terus mengalami perkembangan yang cukup cepat. Perkembangannya tidak saja terletak pada strukturnya seperti dari keluarga luas (*extended family*) menjadi keluarga inti (*nuclear family*) orang tua tunggal (*single parent*) tetapi juga sebagian fungsi-fungsinya. Oleh karena itu tidak dapat dihindari lagi tentang munculnya berbagai pelayanan pengganti fungsi keluarga.

Cholid Mansyur (1991) tentang pengertian keluarga yakni merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari suami istri dan anak-anak yang belum dewasa, keluarga merupakan community primer yang paling penting dalam masyarakat. Community primer ialah suatu kelompok dimana hubungan

antara para anggotanya sangat erat. Adapun sifat-sifat keluarga yakni emosional artinya rasa kasih sayang, kecintaan sampai kebanggaan suatu ras. Keluarga juga diartikan sebagai kelompok atau golongan masyarakat yang kecil.

Mengenai pemberdayaan keluarga pada dasarnya ditujukan pada terwujudnya peranan keluarga masing-masing anggota keluarga dan nilai keluarga, terciptanya interaksi dan interelasi setiap anggota keluarga sehingga saling mengisi dan saling melengkapi sehingga terwujudnya keutuhan keluarga dan meningkatnya tanggung jawab sosial keluarga dalam merespon berbagai masukan sosial yang berkembang di masyarakat.

Selanjutnya mengenai kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia yakni meliputi sandang, pangan, papan, disamping kebutuhan kesehatan maupun pendidikan (Maskin, 1992). Pada dasarnya kemiskinan merupakan fenomena sosial yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang kelompok maupun masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dimensi kemiskinan dapat berupa keadaan melarat (deprivation) dan bila dimasukkan dalam konteks tertentu kemiskinan berkaitan dengan minimnya pendapatan, harta, kekuatan fisik isolasi kerapuhan dan ketidakberdayaan (Chambers, 1996).

Baswir dkk (2003) mengatakan, kemiskinan disebabkan oleh kondisi yang dibuat manusia disebut kemiskinan struktural, kemiskinan struktural disebabkan beberapa faktor yaitu :

- a. Kecilnya kesempatan kerja sehingga masyarakat yang tergolong miskin tidak memiliki penghasilan yang memadai.
- b. Penghasilan (upah) dibawah standar minimum sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar
- c. Produktivitas kerja yang rendah
- d. Ketiadaan aset misalnya lahan pertama
- e. Diskriminasi dalam jenis kelamin (gender) dan perbedaan kelas sosial
- f. Penjualan lahan atau tanah yang berpotensi untuk masa depan keluarga.

Menurut Cahyono (2002) terjadinya kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan harus didekati dari perwujudan berbagai sudut pandang, namun garis besarnya kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh faktor intern dan faktor ekstern sebagai berikut :

- a. Faktor intern mencakup :
 - 1) SDM yang terbatas atau kurang memadainya pengetahuan dan keterampilan baik dalam tingkat kualitas maupun jenis
 - 2) Kondisi fisik yang lemah sehingga produktivitas rendah
 - 3) Kerentanan akibat dari kerentanan ini penduduk miskin terpaksa harus menjual atau menggadaikan kekayaannya.
 - 4) Ketidakberdayaan mendorong pemerataan dan kawan yang lebih kaya dan kuat.

b. Faktor ekstern mencakup :

- 1) Sempitnya kepemilikan lahan pertanian dan berlangsungnya sistem penguasaan lahan yang kurang seimbang.
- 2) Ketidakmerataan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial yang tidak terbatas pada modal produksi atau aset, tetapi meliputi sumber-sumber keuangan (penghasilan dan kredit) jaringan sosial, untuk memperoleh pekerjaan, barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Lingkungan sosial budaya yang mengakibatkan kurang tingginya hasrat untuk maju dalam kehidupan masyarakat.
- 4) Keterbatasan sarana dan prasarana ekonomi sosial, kesehatan dan transportasi berimplikasi pada kehidupan penduduk miskin di wilayah setempat.

Dimensi kemiskinan petani merujuk pada pendapat Cahyono (2002) yang mengatakan bahwa kemiskinan petani merupakan ketidakmampuan petani untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni terbatasnya SDM yang menyangkut pengetahuan dan keterampilan, produktivitas rendah, sempitnya lahan pertanian, ketidakmerataan kesempatan untuk mengakumulasikan modal pendukung dan aset sumber keuangan serta jaringan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1981 tentang pelayanan kesejahteraan sosial fakir miskin menjelaskan konsep kemiskinan yaitu individu yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Untuk kepentingan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, khususnya pelayanan kesejahteraan sosial fakir miskin diperlukan indikator yang lebih merefleksikan tingkat kemiskinan sesungguhnya di masyarakat. Indikator yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Penghasilan yang rendah dapat diukur dari tingkat pengeluaran perorangan perbulan berdasarkan standar BPS.
- b. Ketergantungan pada bantuan pangan, kemiskinan
- c. Keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup oleh setiap anggota keluarga pertahun.
- d. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit.
- e. Tidak mampu membiayai pendidikan SD bagi anak-anaknya
- f. Tidak memiliki harta kekayaan
- g. Ada anggota keluarga yang meninggal dalam usia muda atau kurang dari 40 tahun akibat tidak mampu mengobati penyakit sejak awal.
- h. Ada anggota keluarga usia 15 tahun keatas yang buta huruf.
- i. Tidak ada tempat tinggal yang layak huni.

Kemiskinan serta penyebabnya berdampak terhadap ketidakberdayaan masyarakat yang bersumber dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial (Friedmann, 1992). Basis kekuasaan sosial tersebut seperti tingkat pendidikan, pendapatan, kesehatan dan gizi.

Pengertian kemiskinan absolut menurut Yamasy (2004) ialah apabila tingkat pendapatan keluarga dibawah garis kemiskinan atas sejumlah pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum antara kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Fenomena kemiskinan bukan hanya terbatas pada kurangnya keuangan, melainkan kurangnya kreativitas, kurangnya motivasi, kurangnya kesempatan untuk bersosialisasi dengan berbagai potensi dan sumber daya yang ada serta secara khusus bahwa persoalan ini telah melingkar diantaranya lemahnya mengembangkan potensi diri dan tertutupnya potensi diri untuk berkembang di masyarakat.

Berkaitan dengan keluarga miskin adalah keluarga yang sejak awal tidak memiliki harta kekayaan yang dapat digunakan atau memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Sejak dini nenek moyang terdapat sejumlah besar keluarga telah mengalami kesulitan sosial ekonomi (Buletin Departemen Sosial, 1998).

Keluarga yang tergolong miskin, tidak berdaya, tidak memiliki mata pencaharian tetap dan bekerja sebagai buruh tani, nelayan, buruh kasar (tukang batu), tukang kayu, buruh pelabuhan, pendorong gerobak dan lain adalah jenis pekerjaan yang tidak memberi keuntungan bagi pemenuhan kebutuhan hidup tetapi mendapat tekanan fisik dan dililit hutang sehingga tidak mungkin terlepas dari masalah kemiskinan.

Kelompok keluarga yang potensial harus diberdayakan oleh pemerintah, melalui berbagai program bantuan sosial agar dengan keterampilan yang dimiliki dapat memanfaatkan bantuan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara wajar dan manusiawi. Program pengentasan kemiskinan bagi keluarga ternyata dapat merubah pola pikir dan kecenderungan untuk mengembangkan usaha yang lebih produktif berkat bimbingan dan pembinaan keluarga miskin.

B. Pengembangan Sosial Ekonomi Keluarga

Pengembangan sosial ekonomi sebagai akibat adanya kesenjangan sosial di kalangan keluarga yang tergolong ekonomi lemah yang terpuruk sebagai akibat tidak adanya kesempatan memperoleh lapangan kerja, tingkat pendidikan yang rendah serta upaya untuk mendorong pengembangan kerja di berbagai sektor bagi kelompok masyarakat masih sangat terbatas.

Upaya untuk mendapatkan kesempatan berusaha bagi keluarga miskin seyogyanya telah dilaksanakan pemerintah melalui program bantuan sosial baik dalam bentuk bimbingan maupun bantuan peralatan kerja. Namun demikian usaha ini belum memberikan hasil yang diharapkan, untuk itu keluarga yang tergolong miskin dapat mengorganisasikan kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk menentukan, merencanakan dan melaksanakan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhannya.

Sasaran pengembangan sosial ekonomi bagi kelompok keluarga yang tergolong miskin atau kurang mampu pada dasarnya ditujukan untuk perbaikan ekonomi dengan menghimpun potensi yang dimiliki agar dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar dan bertanggung jawab. Berbagai langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan pengembangan sosial ekonomi kelompok keluarga tergolong miskin adalah :

1. Memberikan bimbingan kerja secara tertib dan terencana dalam bentuk kelompok-kelompok kerja
2. Menyediakan lahan usaha sesuai tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seperti sektor informal yang memiliki prospek usaha yang cukup produktif.
3. Menyediakan fasilitas atau peralatan kerja yang memadai sesuai kebutuhan usaha yang dikembangkan.

4. Usaha yang dikembangkan dapat dilakukan secara individu (perorangan) maupun dalam bentuk kelompok usaha dengan memperhitungkan tingkat keefektifannya.
5. Pengawasan dan pengendalian usaha diharapkan dapat dilaksanakan secara berkala oleh petugas pembinaan lanjut.

Langkah-langkah pelaksanaan pengembangan usaha sosial ekonomi keluarga yang tergolong miskin dinilai efektif jika berjalan tanpa hambatan karena yang paling menentukan keberhasilan dari program yang dikembangkan pemerintah adalah kalangan kelompok masyarakat yang berperan aktif dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan kesadaran dan perubahan pola pikir untuk menghadapi pekerjaan yang semakin kompleks dengan motivasi kerja yang tinggi.

Di dalam pengembangan sosial ekonomi keluarga yang menganut sistem kegotongroyongan sebagaimana dikemukakan Harry (2001) adalah upaya yang dilakukan kelompok masyarakat untuk menghimpun kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dengan dijiwai semangat kebersamaan untuk merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan yang produktif di berbagai bidang dengan tujuan untuk meningkatkan kebutuhan hidup secara layak.

Upaya dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri, telah memberikan hasil positif bagi perbaikan hidup keluarga yang tergolong miskin, terutama pada kalangan masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi. Dalam kegiatan ini tidak

ditemukan adanya persaingan kebutuhan tetapi tekadnya untuk saling membantu dan bergotong royong untuk menciptakan kehidupan sosial ekonomi keluarga yang didambakan.

Disadari bahwa upaya perbaikan sosial ekonomi keluarga yang tergolong miskin bukan hal yang mudah karena kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menangani kelompok masyarakat ini dinilai masih perlu ditingkatkan. Pemerintah melalui Dinas Sosial mengembangkan Kelompok Usaha Bersama (Kube) untuk meningkatkan perbaikan ekonomi keluarga miskin, yang membutuhkan program yang terencana mengingat dana dan fasilitas yang tersedia sangat terbatas sedangkan penanganan permasalahan kemiskinan terus meningkat.

Strategi yang ditempuh dalam penanganan program perbaikan sosial ekonomi keluarga sesungguhnya dikaji secara cermat untuk melibatkan kelompok keluarga yang rentan terhadap permasalahan sosial kemiskinan yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

C. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama adalah suatu perkumpulan atau organisasi kecil yang ada di desa/kelurahan yang dibentuk oleh Departemen Sosial RI (2003.6).

Untuk mempermudah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada keluarga miskin.

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (PP No 42 Tahun 1941).

KUBE fakir miskin adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk, dan tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan tujuan produktifitas anggotanya meningkatkan relasi sosial yang harmonis memenuhi kebutuhan anggotanya memecahkan masalah sosial yang dialami dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama (Departemen Sosial RI 2003:6).

KUBE merupakan kelembagaan ekonomi dan sosial, tujuan KUBE bukan hanya menekankan pada aspek sosial, yaitu kepedulian kesetiakawanan sosial dengan cara melibatkan masyarakat dilingkungannya untuk ikut serta dalam proses produksi yang dilakukan oleh para anggota KUBE. Jadi bukan saja anggota KUBE yang meningkat penghasilannya tetapi masyarakat sekitarnya pun merasakan manfaat dari keberadaan KUBE.

Keberadaan KUBE ditengah – tengah masyarakat merupakan media, sarana untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi warga miskin untuk lebih

maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok mendayagunakan potensi dan sumber sosial lokal memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait.

KUBE harus diwujudkan dalam bentuk kerja sama yang berlangsung secara terus-menerus. Kerja sama yang tulus biasanya hanya dapat diwujudkan bila dilandai oleh semangat gotong-royong dan kesetiakawanan sosial. Dalam kelompok terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya yang akhirnya menimbulkan semangat kekeluargaan bahkan dengan lingkungan eksternal kelompok. KUBE dimaksudkan untuk mewujudkan keberfungsian sosial anggota dan keluarganya yang meliputi hal-hal yakni meningkatnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan berubahnya sikap dan perilaku dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.

Menurut Departemen Sosial RI (2003:12) Tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah :

1. Meningkatnya kemampuan anggota kelompok KUBE dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan dengan melaksanakan kegiatan keagamaan dan meningkatnya pemenuhan kebutuhan sosial lainnya.

2. Meningkatnya kemampuan anggota kelompok KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarga maupun dengan lingkungan sosialnya, perbedaan yang mungkin timbul di antara keluarga dan lingkungan, semakin minimnya perselisihan yang timbul di antara keluarga. Terjadinya perbedaan dalam kelompok adalah hal yang biasa.
3. Meningkatnya kemampuan anggota kelompok KUBE dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya, ditandai dengan semakin meningkatnya kepedulian dan rasa tanggung jawab dan keikutserta anggota dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial di lingkungannya.

Pendekatan yang dikembangkan dalam program ini adalah pendekatan kelompok untuk efektivitas dan efisiensi pengembangan KUBE maka pengelolaan KUBE dilakukan dengan pendekatan kelompok. Pertimbangan penerapan pendekatan bertumpu pada kelompok adalah :

1. Warga masyarakat lebih dinamis dalam mengembangkan kegiatan.
2. Adanya proses saling asah, asih, asuh sesama warga/anggota kelompok sehingga setiap anggota bisa saling berbagi baik dalam ilmu maupun keterampilan.
3. Adanya konsep saling menolong dan konsolidasi kekuatan bersama antara yang kuat dan yang lemah.

Sasaran kelompok kube adalah mereka yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal seperti keterbatasan penghasilan, perumahan, kesehatan, pendidikan, kemampuan, keterampilan, kepemilikan modal, komunikasi, teknologi dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa berbagai keterlibatan yang dimiliki kelompok miskin dapat teratasi melalui pengembangan Kelompok Usaha Bersama.

Adapun prinsip-prinsip pengembangan kube adalah sebagai berikut :

1. Penentuan nasib sendiri, yaitu bahwa anggota kube sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, mempunyai hak untuk menentukan dirinya sendiri. Dalam nilai seperti itu para supervisor yang terlibat dalam kegiatan kube berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan kube.
2. Kekeluargaan, prinsip ini menekankan bahwa pengembangan kube perlu dibangun atas semangat kekeluargaan diantara sesama anggota kube dan lingkungannya. Nilai ini akan mencerminkan serta menumbuhkan semangat dan sikap kerja tanpa pamrih.
3. Kegotongroyongan berarti menuntut adanya kebersamaan dan semangat kebersamaan diantara sesama anggota kube. Dalam prinsip ini tidak menonjol adanya perbedaan atasan dan bawahan tetapi lebih mengedepankan kebersamaan diantara sesama keluarga binaan sosial.

4. Potensi anggota, bahwa pengelolaan dan pengembangan kube harus didasarkan pada kemampuan dan potensi yang dimiliki anggota kube.
5. Sumber-sumber setempat, prinsip ini menekankan bahwa pengembangan usaha yang dilakukan harus didasarkan pada ketersediaan sumber-sumber yang ada di daerah tersebut. Adalah menjadi suatu kendala bilamana suatu jenis usaha yang dikembangkan namun sumber-sumber yang menjadi bahan baku di daerah tersebut tidak ada.
6. Keberlanjutan, prinsip ini menekankan bahwa kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pengembangan bidang usaha kube harus diwujudkan dalam program-program yang berkelanjutan, bukan hanya untuk sementara waktu.
7. Usaha yang berorientasi pasar, prinsip ini menekankan bahwa pengembangan kube melalui jenis usaha yang dilakukan harus diarahkan pada jenis usaha yang memiliki prospek yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Mengenai kriteria kelompok usaha bersama antara lain :

1. Jumlah anggota kube dapat berkembang sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Anggota kube dapat berkembang menjadi kelompok besar.

2. Kepengurusan dan pembagian tugas sudah ada dan dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
3. Perkembangan usaha dimana kube dijadikan sebagai usaha pokok, kinerjanya mempunyai lebih dari dua jenis usaha.
4. Tanggung jawab sosial sudah baik yang ditunjukkan dengan kesediaan anggota untuk membantu anggota dan tetangganya yang mengalami musibah.
5. Kemampuan pemupukan modal yang dapat diketahui dengan jumlah modal yang dimiliki kube.
6. Kemitraan yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak sudah dilakukan.

Keberhasilan pengelolaan kube dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, pertama, anggota aktif dan mempunyai minat dan kemauan yang tinggi dalam mengelola usaha serta mempunyai pengetahuan dan keterampilan dan pengalaman kerja yang sesuai dengan usaha kube yang dikelola. Kedua, motivasi anggota untuk mengelola kube cukup tinggi karena adanya pembagian tugas yang merata diantara anggota kelompok sehingga kerja sama dalam pengelolaan kube berjalan dengan lancar.

D. Pendamping Sosial Kube

Berkaitan dengan fungsi pendamping sosial diketahui bahwa fungsi tersebut sangat krusial dalam membina Kelompok Usaha Bersama. Pendamping bertujuan menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator, komunikator maupun dinamisator. Dengan pendamping ini kelompok binaan tidak bergantung pada pihak luar namun dibantu untuk tumbuh dan berfungsi sebagai kelompok kegiatan yang mandiri. Pendamping sosial diharapkan menjadi pihak yang membantu kelompok dalam masa tertentu dan suatu saat dapat mandiri karena mampu berusaha mengelola kegiatan dalam Kelompok Usaha Bersama.

Chambor yang dikutip Ons S. Prijono (1998: 147) mengemukakan bahwa kondisi masyarakat miskin memiliki ketidakberdayaan memerlukan pihak lain yang dapat berfungsi sebagai pendorong atau pemancing daya masyarakat miskin sebelum akhirnya masyarakat miskin sendiri yang berperan dalam mengatasi masalahnya. *Proses dialogical tercounter* antara pendamping dengan kelompok masyarakat miskin yang memerlukan *sense of trust*, dengan demikian komunikasi intensif harus terjadi antara pendamping dan anggota kelompok.

Pendamping harus berfungsi sebagai pihak yang selalu siap dibutuhkan, pendamping harus bekerja penuh waktu, menghadiri pertemuan kelompok, mengorganisir program latihan serta membantu kelompok memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan. Jenis

keterampilan pokok pekerjaan sosial yang diperlukan dalam memberikan pelayanan yakni :

1. Keterampilan mempersiapkan panggung, adalah kemampuan mengatur berbagai cara pertemuan, perhatian dan tindakan yang akan dilakukan dengan orang lain.
2. Keterampilan melibatkan perasaan. Keterampilan yang dimaksud untuk mengungkapkan dan membahas perasaan-perasaan orang lain yang dapat menghambatnya untuk berkomunikasi.
3. Keterampilan mendayagunakan informasi. Informasi merupakan sumbu yang dapat mengurangi ketidakpastian dengan cara memberi bentuk atau ciri pada suatu situasi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perlunya pendamping menguasai keterampilan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembinaan kube terutama dalam berkomunikasi dengan penerima pelayanan. Tentang sikap dan perilaku pendamping sosial pada hakikatnya adalah seorang pemimpin (informal) dan sebagai pemimpin maka diri pendamping sosial juga perlu memiliki kecenderungan untuk tampil menjadi diri sendiri didalam orang lain (W.I.M. Poli, 1999).

Dengan menonjolkan sikap dan perilaku yang dimaksud maka tercipta hubungan dan kedekatan untuk menciptakan situasi yang tertib dan kesungguhan individu bekerja sama dalam kelompok dalam memecahkan setiap permasalahan sosial yang dihadapi. Menyangkut proses

pendampingan sosial pada dasarnya dinilai penting karena merupakan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu dengan yang lain, keberhasilan atau kegagalan suatu tahap kegiatan akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tahap kegiatan lainnya.

Langkah-langkah pendampingan sosial yang dimaksud adalah :

1. Menumbuhkan kepercayaan yaitu proses kegiatan yang terencana dalam membantu kube dengan cara menciptakan hubungan pribadi dengan para tokoh masyarakat (*key people*), tokoh adat, tokoh agama, pengurus organisasi sosial dengan pihak terkait lainnya dengan cara tinggal dan hidup di lingkungan mereka.
2. Menciptakan kesepakatan yaitu proses kegiatan terencana dalam membantu kube memastikan kesediaan mereka menerima pendamping sosial dalam membantu melaksanakan kegiatan kube di bidang sosial, ekonomi dan kelembagaan kube serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapi kube.
3. Membentuk tim kerja kelompok yaitu proses kegiatan yang terencana dalam membantu kube guna memecahkan masalahnya melalui pembentukan tim kerja kelompok.
4. Perencanaan yaitu proses perencanaan bersama kube dalam menggunakan organisasi dan pelayanan sosial yang ada.
5. Pelaksanaan yaitu proses pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial bersama kube melalui pendampingan sosial.

6. Evaluasi dan pelaporan yaitu proses mengukur, menilai dan mempertanggungjawabkan proses dan hasil tugasnya sebagai pendamping sosial.
7. Mencatat keberhasilan dan kegagalan yaitu serangkaian kegiatan dalam membantu kube dan anggotanya, mencatat keberhasilan dan kegagalan guna dijadikan bahan pembelajaran menuju perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.

Kegiatan terhadap langkah-langkah yang dilakukan pendamping dalam pendampingan sosial harus berjalan dengan lancar sehingga keberhasilan yang dicapai anggota dalam kube adalah mengembangkan usaha merupakan bimbingan dan petunjuk yang dilakukan oleh pendamping sosial melalui proses secara bertahap.

E. Kerangka Pikir

Pemberdayaan keluarga miskin melalui KUBE fakir miskin di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sebagai berikut :

1. Pemberdayaan keluarga miskin adalah suatu upaya dalam meningkatkan kemampuan keluarga sesuai potensi yang dimiliki dalam pencapaian tingkat kesejahteraan yang tertib dan lancar, oleh karena perlu ditunjang dengan pembinaan kemampuan kerja dan dukungan peralatan keterampilan yang memadai.

2. Program kube dimaksud adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk memanfaatkan kemampuan keluarga miskin dalam mengelola usaha industri rumah tangga yang bersifat produktif.
3. Manfaat pemberdayaan keluarga melalui kube adalah :
 - a. Penguatan Kapasitas diri
 - Pelatihan Praktis, bimbingan sosial dan pengembangan kelambagaan
 - b. Peningkatan pendapatan ekonomi keluarga
 - c. Mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
 - d. Kemandirian dalam berusaha
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan keluarga miskin melalui kube :
 - a. Faktor pendukung (keberhasilan)
 - Kebijakan pemerintah
 - Bimbingan Sosial.
 - Bantuan Sosial.
 - Pelatihan keterampilan.
 - Tersedianya peralatan kerja
 - Pendamping sosial yang aktif
 - b. Faktor penghambat (kegagalan)
 - Rendahnya tingkat pendidikan
 - Dukungan instansi terkait terbatas
 - Kepemilikan aset / modal kurang memadai
 - Kurangnya dukungan dana

Gambar kerangka pikir proses pemberdayaan keluarga miskin :

